

Makna & Ruang Lingkup Governance

Fatih Gama Abisono, SIP, MA
Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD

KERANGKA PAPARAN

- *Governance:*
Pola interaksi
negara-masyarakat.
- Pola dasar *governance:*
state vs. market.

DEFINISI:

- ▶ *Governance*, adalah pemberlakuan tatanan baku sedemikian rupa sehingga masalah-masalah publik yang mengedepan bisa diatasi.
- ▶ Penanganan masalah publik bisa mengandalkan komando dan kendali pemerintah, namun bisa juga justru dengan menjauhkan dari keterlibatan pemerintah, yakni dengan mengandalkan mekanisme jual-beli secara **sukarela** (*market mechanism*).

DEFINISI:

(United Nation Development Programme):

“Governance embraces all of the methods —good and bad—that societies uses to distribute power and manage public resources and problem.

Sound governance is therefore a subset of governance, wherein public resourcess and problems are managed effectively, efficiently and in response to critical needs of society.”

Prinsip !

- ▶ *Proses governance* hanya berlangsung dengan baik kalau proses tersebut konsisten dengan tertib sosial tertentu.
- ▶ Masyarakat suatu negeri memiliki caranya sendiri untuk menjaga tertib sosial tertentu.
- ▶ Tertib sosial tersebut terjadi karena terbakukanya kaitan antara individualitas dengan kolektivitas.

Gambarkanlah tentang masyarakat !

- ▶ Bagaimana ketertiban umum terjadi?
- ▶ Bagaimana interaksi individu dan kolektivitas ?
- ▶ Bagaimana cara mereka memecahkan masalah-masalahnya?

Gambarkanlah negara !

- ▶ Bagaimana ketertiban umum terjadi?
- ▶ Bagaimana interaksi individu dan kolektivitas ?
- ▶ Bagaimana cara mereka memecahkan masalah-masalahnya?

Apa yang sebetulnya menentukan terselenggaranya kepentingan publik ?



**DOKTER
MENGANGGUR**

Ada PELUANG
BISNIS yang
bisa
dimanfaatkan



**PELAYANAN
KESEHATAN
TIDAK MEMADAI**

Apa yang sebetulnya menentukan terselenggaranya kepentingan publik ?



**DOKTER
MENGANGGUR**

Ada **MASALAH
RAKYAT** yang
harus
dipecahkan



**PELAYANAN
KESEHATAN TIDAK
MEMADAI**

Tertib Sosial

A la Negara

- Publik
- Otoritas & hierarkhi
- *Rules & role*
- Prosedur & mekanisme
- Kepatuhan

A la Pasar

- *Self-interest*
- kreativitas
- *Supply-demand*
- Transaksi suka-sama suka
- *Invisible hand*

Nalar Polis vs. market

	<i>MARKET</i>	<i>POLIS</i>
UNIT ANALISIS	Individual	Komunitas
MOTIVASI	Kepentingan sendiri-sendiri	Kepentingan publik
KONFLIK YG. DIPERHATIKAN	Self-interest vs. self-interest	Self-interest vs. public interest
SUMBER GAGASAN DAN PREFERENSI	Tumbuh dg. sendirinya dlm individu	Pengaruh dari luar
HAKEKAT AKSI KOLEKTIF	Kompetisi	Kerjasama dan kompetisi

Nalar Polis vs. market

	<i>MARKET</i>	<i>POLIS</i>
KRITERIA PEMBUATAN KEPUTUSAN MASING-MASING	Maksimalisasi keuntungan, minimalisasi beban-biaya	Loyalitas (thd. orang, organisasi, produk); minimalisasi kepentingan pribadi, mengedepankan kepentingan umum
PENENTU AKSI-AKSI SOSIAL	Individu	Kelompok dan organisasi
SIFAT INFORMASI	Tersedia secara akurat dan lengkap	Ambigu, interpretatif, tdk lengkap, termanipulasi untuk kepentingan tertentu

Nalar Polis vs. market

	<i>MARKET</i>	<i>POLIS</i>
DASAR BEKERJANYA SEGALASESUATU	Hukum-hukum kealaman (Misal: sumberdaya material ada dlm jml terbatas dan semakin banyak dipakai semakin habis)	Hukum-hukum kehendak (Misal: sumberdaya manusia senantiasa terbaru dan semakin dipakai semakin membaik)
SUMBER PERUBAHAN	Pertukaran materi Perjuangan maksimalisasi kesejahteraan diri	Idea, persuasi, aliansi Perjuangan kekuasaan & kesejahteraan, demi kepentingan publik

KONSEP DASAR (1)

- ▶ Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dikembangkan dari dua pilar penyangga ketertiban sosial (*social order*):
Hierarki.
Transaksi suka sama suka.
- ▶ Penyelenggaraan negara di Indonesia selama ini sangat mengandalkankan tertib sosial berdasar hierarki: yakni birokrasi.
- ▶ Transaksi suka sama suka terjadi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam sektor komersial. Tertib sosial atas dasar transaksi suka sama suka ini disebut 'pasar'.

KONSEP DASAR (2)

- ▶ Para pelaku pasar berskala besar mengelola interaksi dengan pihak lain secara kelembagaan. Seiring dengan membesarnya organisasi-organisasi kemasyarakatan/bisnis, justru dikembangkan birokrasi. Birokratisasi diperlukan untuk mengelola aksi kolektif berskala besar.
- ▶ 'Negara' dan 'pasar' bisa berfungsi secara berdampingan. Tidak tertutup kemungkinan pengelolaan negara dilakukan justru dengan mengadopsi cara kerja mekanisme pasar.

KONSEP DASAR (3)

- ▶ Untuk memperkecil resiko kegagalan negara (*state failure*) pemerintah justru harus faham tentang bagaimana masyarakat mengatur diri mereka sendiri: melalui transaksi suka sama suka.
- ▶ Sebaliknya, untuk memperkecil resiko kegagalan pasar (*market failure*) masyarakat perlu meningkatkan kemampuan organisasionalnya dalam pengelolaan kepentingan publik.
- ▶ Karena ketidakmampuan untuk saling meniadakan ini maka negara dan pasar difahami sebagai 'ranah' atau 'arena', bukan sosok.

TERIMA KASIH